

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

Dalam penelitian ini peneliti dituntut tidak apriori terhadap subyek penelitian. Sedangkan sebaliknya, peneliti diharapkan masuk ke subyek penelitian dengan kepala kosong atau tanpa rancangan konseptual. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan peneliti dari sikap yang memaksakan interpretasi data-data empirikal sesuai dengan level konseptual dan teoritikal. Namun, tinjauan teoritik pada bab ini tidak dimaksudkan sebagai landasan utama, tetapi untuk melengkapi logika induktif-diduktif semata. Beberapa teori dan konsep yang disuguhkan berikutnya digunakan sebagai landasan untuk melakukan pendampingan masyarakat Desa Sudimoro.

A. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencaaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.⁶

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 3

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Dengan cara ini peningkatan pengembangan Desa Swadaya ke Desa Swakarya selanjutnya menuju Desa Swasembada dapat dipercepat terwujudnya. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa/kelurahan, mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri.⁷

1. Peran dan Fungsi Daerah Pedesaan

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga

⁷ *Ibid*, hal. 4

keaktivitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.⁸

Dalam lingkup nasional, pembangunan nasional mendorong pembangunan regional, dan pembangunan regional adalah memperkuat pembangunan nasional. Dalam lingkup yang lebih sempit, pembangunan kecamatan, mendorong pembangunan desa, dan pembangunan desa adalah memperkuat pembangunan kecamatan. Pada tingkat yang lebih atas dilakukan pendekatan pembangunan *top-down* (dari atas ke bawah) sedangkan pada tingkat bawah dilakukan pendekatan pembangunan *bottom –up* (dari bawah ke atas). Pendekatan *top-down* masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang sifatnya vital atau yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, misalnya pembangunan pelabuhan laut, pembangunan listrik, pembangunan jalan arteri primer, perumahan rakyat, Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan lainnya. karena program pembangunan pedesaan yang dilauakn harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan

⁸ *Ibid*, hal. 12

masyarakat, maka pendekatan pembangunan desa seharusnya bersifat bottom-up yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif.⁹

2. Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up Planning*)

Pembangunan pedesaan bersifat multidimensional dan multi aspek. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial-budaya, spasial dan non spasial). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya.
- b. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.

⁹ *Ibid*, hal. 5

- c. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.¹⁰

Masyarakat pedesaan tidak hanya sebagai penonton, tetapi mereka harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menikmati hasil pembangunan. Namun pelaksanaannya perlu ada pihak atau suatu lembaga yang dapat mengorganisir, memfasilitasi, dan menggunakan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu kondisi fundamental yang berlaku dan dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Partisipasi masyarakat itu mengikuti perkembangan zaman dari sistem pemerintahan yang berlangsung dalam suatu kurun waktu. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *top-down*, dan partisipasi masyarakatnya adalah bersifat mobilisasi atau pengerahan massa. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang desentralistik/otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *bottom-up* dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

3. Permasalahan Pokok Pembangunan Pedesaan

Permasalahan pokok pembangunan pedesaan pada dewasa ini meliputi:

- a. Mempertahankan peningkatan produksi pangan (beras dan lainnya)

¹⁰ *Ibid*, hal. 30

- b. Peningkatan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pengembangan industri pedesaan
- c. Mendorong ekspor dan substitusi impor
- d. Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- e. Pemasaran hasil-hasil produksi daerah pedesaan
- f. Perluasan lapangan kerja di daerah pedesaan
- g. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM
- h. Peningkatan keswadayaan masyarakat
- i. Penguatan kelembagaan pedesaan (ekonomi dan sosial)
- j. Pengurangan tingkat kesenjangan antar golongan masyarakat dan antar tata ruang dalam lingkup daerah pedesaan
- k. Peningkatan partisipasi masyarakat.¹¹

Adapun salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan di kabupaten tidak disusun secara terintegrasi dan terpadu. Untuk menentukan tingkat efektivitas dari keterpaduan perencanaan pembangunan desa/kelurahan, dapat digunakan beberapa indikator yaitu:

- a. Keterpaduan dan kerjasama antar lembaga-lembaga desa/kelurahan, pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan dalam proses penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan dan pengendalian.
- b. Keterpaduan pemerintah desa/kelurahan dengan instansi sektoral.

¹¹ *Ibid*, hal. 21-22

- c. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi baik desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten.¹²

4. Pembangunan dalam Konsep Islam

Proses globalisasi yang melanda negara-negara di dunia termasuk indonesia, yang mana globalisasi ekonomi melanda indonesia bertemu dengan implikasi dari proses pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah indonesia. Pembangunan itu sendiri diharapkan bisa mengembangkan manusia indonesia yang utuh, sejahtera lahir batin, material dan spiritual. Seharusnya, perkembangan di dalam negeri ini dipelihara dan ditingkatkan kelangsungannya karena proses pembangunan manusia dan masyarakat memang tidak akan pernah berakhir.¹³

Proses pembangunan yang bersumber dari Barat tetap memberikan pengaruh melalui globalisasi. Apabila pembangunan di Indonesia yang didasarkan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya, maka dakwah pengembangan adalah pembangunan manusia Islami yang kedua-duanya sama-sama berupaya membawa manusia menjadi manusia sejahtera lahir dan batin. Dakwah pengembangan sangat berpeluang dan harus mengambil tanggung jawab dengan memegang peran aktif. Dengan peran aktif dakwah pengembangan maka pembangunan manusia Indonesia akan mendapatkan jaminan moralitas dan etika

¹² *Ibid*, hal. 85-86

¹³ Shonhaji Sholeh, “*Dakwah Pengembangan dalam Era Milenia Prospek dan Tantangan* “ dalam Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini dan A. Halim (ed.), *Dakwah Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 48

keagamaan ini akan memberikan arahan pembangunan manusia Indonesia untuk melahirkan manusia unggul secara material dan spiritual.¹⁴

Menurut Soetomo, pembangunan masyarakat mengandung empat unsur dasar, yaitu (1) pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan, (2) pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumberdaya dan peluang, (3) pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon berbagai persoalan yang berkembang, (4) pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi.

a. Tanggung Jawab Sosial

Pembangunan masyarakat merupakan fenomena yang muncul sepanjang kehidupan manusia, atau lebih tepatnya sepanjang manusia hidup bermasyarakat.¹⁵ Dalam konsep Islam terkait pembangunan manusia yang islami, bahwa untuk menjadi masyarakat seutuhnya yaitu masyarakat yang sejahtera lahir dan batin,¹⁶ maka perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan tanggung jawab individu dan pemerintah. Allah telah memberikan manusia kesehatan, pikiran, harta, keluarga, dll sejauh manakah kita telah memanfaatkannya?. Salah satu tanggungjawab penting yang ditekankan kepada

¹⁴ Shonhaji Sholeh, "*Dakwah Pengembangan...*", hal. 48-49

¹⁵ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 1

¹⁶ Shonhaji Sholeh, "*Dakwah Pengembangan...*", hal. 48

kita, sebagai konsekuensi sistem keyakinan dan sisten nilai, adalah kepedulian kepada kemanusiaan, tegaknya keadilan ditengah-tengah masyarakat, menentang perlakuan semena-mena dan kesewenang-wenangan , dan perjuangan pada penegakan nilai-nilai sosial yang mengantarkan kepada kesempurnaan masyarakat. Poin-poin yang kita sebutkan itu merupakan wujud dari tanggungjawab sosial kita sebagai umat Islam, yang juga merupakan salah satu tujuan diutusnya para nabi Allah, terutama teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi terakhir Muhammad saw. Hal ini disebutkan dalam surat al Anfal (8) ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

“Dan hindarilah siksa yang sekali-kali tidak menimpa secara khusus orang-orang yang dzalim diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.”¹⁷

Peringatan ini perlu agar setiap orang juga terampil melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Untuk itu, ayat ini berpesan: Dan disamping kamu berkewajiban memenuhi panggilan Allah dan Rasul, juga (واتقوا) *wattaquu/hindarilah* datangnya siksa yang bila ia datang sekali-kali tidak menimpa secara khusus orang-orang yang dzalim, yakni yang melanggar dan enggan memperkenankan seruan Rasul diantara kamu, hai orang mukmin yang

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 503

telah memperkenankan seruan itu. Karena itu, jangan lesu atau jemu mengajak kepada kebaikan dan mencela kemungkar. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksa-Nya.¹⁸

Sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak selalu hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan dua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Jadi, tanggung jawab itu adalah milik semua orang, kewajiban semua orang yang dimulai dari masing-masing individu masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dapat berakibat fatal, akan timbul kekacauan karena yang melanggar telah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Nah, ketika itu akan terjadi kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat--yang taat maupun yang durhaka—ditimpa krisis. Demikian pengalaman umat manusia sejak dulu sampai sekarang. Karena itu, ayat ini berpesan: Buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengan-Nya. Laksanakanlah tuntutan-Nya dan anjurkan pula orang lain melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkar karena, kalau tidak, kamu semua akan ditimpa bencana. Dalam kasus bencana yang kita saksikan sendiri di depan mata. Dengan banyaknya korban, kita menyadari peran penting dan tanggungjawab sosial kita, sebagai insan yang selalu diajarkan untuk berbuat baik, saling tolong-menolong, ikut

¹⁸ *Ibid*, hal. 504

berempati, dan merasakan penderitaan saudara-saudara kita sesama muslim. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. yang sudah umum kita dengar, tidaklah kamu mencintai saudaramu jika kamu tidak mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Atau yang lainnya, persaudaraan sesama muslim itu seperti sebuah bangunan, yang masing-masing bagiannya saling menopang satu dengan lainnya.

Demikian pentingnya tanggungjawab sosial ini, sudah saatnya kita sebagai bagian dari umat muslim, haruslah terpanggil untuk saling bahu-membahu untuk meringankan beban-beban saudara kita sebagai korban dalam bentuk perkhidmatan yang seutuhnya atas dasar kemanusiaan. Suatu ketika dikisahkan, Imam Ja'far Shodiq bersama seorang sahabatnya sedang berjalan-jalan, dan didalam perjalanan Imam menyaksikan seseorang sedang dalam keadaan yang sulit, kehausan dan kelaparan. Imam langsung menyuruh sahabatnya untuk memberikan segelas air. Setelah sahabatnya memberikan air tersebut, dalam perjalanan menuju Imam Ja'far, sahabatnya sambil bertiak orang itu beragama nashrani. Lalu Imam menjawab, wahai sahabatku, "Meskipun dia Nashrani, dia tetap sebagai hamba Allah". Itu artinya, kita diajak untuk memberikan pertolongan kepada siapapun, tanpa harus membeda-bedakan, dia

datang dari kalangan, agama, suku, dan kelas manapun. Prinsip dasarnya kita sama diatas basis kemanusiaan, dan sebagai hamba Allah SWT.¹⁹

Dalam konteks ini, Rasul saw. memperingatkan, tidak satu masyarakat pun yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggotanya yang mampu menegur/menghalangi mereka, tetapi dia tidak melakukannya, kecuali dekat Allah akan segera menjatuhkan bencana yang menyeluruh atas mereka” (HR. Ahmad, Abu daud, at-Tirmidzi, ibnu majah, dan lain-lain melalui ibnu Jarir).²⁰

Firman Allah: (أن الله شديد العقاب) *innallaaha syadiidul ‘iqaab/ sesungguhnya Allah Maha keras siksa-Nya* merupakan ancaman setelah sebelumnya telah dikemukakan peringatan. Ini agar semua menyadari bahwa menjatuhkan siksa yang bersifat umum bukanlah sesuatu yang sulit bagi-Nya.²¹

Sayyid Quthb menyebutkan dalam tafsirnya, Tafsir Fi Dzilalil Qur’an, yaitu penafsiran surat an-Nisa’ (4): 36, “...berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu...”, bahwa metode pembangunan masyarakat Islam meletakkan tanggung jawab sosial dimulai dari lingkup keluarga, kemudian meluas ke lingkup masyarakat. Agar tanggung jawab sosial itu tidak terpusat di tangan institusi pemerintahan yang besar, kecuali pada saat institusi-institusi kecil dan bersifat langsung sudah

¹⁹ “Manusia, bencana, dan tanggung jawab sosial,” dalam <http://klitren.wordpress.com/2010/03/20/manusia-bencana-dan-tanggungjawab-sosial/>, di akses pada 27 Mei 2011

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....*, hal. 505

²¹ *Ibid*, hal. 505

tidak mampu menanganinya lagi, maka persatuan-persatuan (organisasi) lokal yang kecil itu harus lebih mampu merealisasikan tanggung jawab ini dalam waktu yang tepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Perealisasiannya dilakukan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang menjadikan udara dan suasana kehidupan ini begitu tepat dan cocok bagi anak manusia.²²

b. Konsep Islam dalam Membela Kaum Lemah

Dalam Islam, kaum lemah itu wajib dibantu dan dibebaskan dari hal-hal yang mendominasi serta mengeksploitasinya. Dalam bahasa Asghar Ali Engineer, pembelaan Islam terhadap kaum lemah ini disebut dengan Teologi Pembebasan. Dalam pandangan Engineer, teologi pembebasan itu dapat dilihat dengan empat hal. Empat hal tersebut antara lain, *pertama*, dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, melawan *status quo* yang melindungi golongan kaya yang berhadapan dengan golongan miskin. *Ketiga*, teologi pembebasan memainkan peranan dalam membela kelompok yang tertindas dan tercabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan golongan yang menindasnya. *Keempat*, teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah

²² Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz SB, Muchotob Hamzah dengan judul *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al Qur'an Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 255

umat islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri.²³

Islam adalah sebuah agama dalam pengertian teknis dan sosial revolutif yang menjadi tantangan yang mengancam strukturyang menindas pada saat ini di dalam maupun di luar Arab. Tujuan dasarnya adalah persaudaraan yang universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*). *Pertama*, Islam menekankan kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang ditegaskan di dalam ayat Al Qur'an, "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*"²⁴ Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya kesalehan. Kesalehan yang disebutkan dalam al qur'an bukan hanya kesalehan ritual, namun juga kesalehan sosial.

Kedua, Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Allah menegaskan bahwa keadilan merupakan ukuran tertinggi suatu masyarakat. Menurut Al Qur'an, taqwa itu tidak dapat dilepaskan dari keadilan.

²³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 1-2

²⁴ Al Qur'an Surat Al Hujurat, 49: 13

“Berlakulah adil, karena itu lebih dekat kepada taqwa.”²⁵ Arti taqwa di dalam Islam bukan hanya menjalankan ibadah ritual saja. Tanpa keadilan sosial, tidak akan ada ketaqwaan. Kesalahan tidak hanya kesalahan ritual saja tapi juga kesalahan sosial, yaitu tidak hanya mementingkan urusan ibadah individual tapi melupakan kondisi orang-orang lemah di sekelilingnya.

Islam *datang* adalah untuk merubah *status quo* serta mengentaskan kelompok yang tertindas dan dieksploitasi; mereka inilah yang disebut dengan kelompok masyarakat lemah. Masyarakat yang sebagian anggota lainnya yang lemah dan tertindas, tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam (*Islam Society*).

Teologi *pembebasan* lebih menekankan pada praksis daripada teoritisasi metafisis yang mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu. Praksis yang dimaksud disini adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi dialektis antara “apa yang ada” (*is*) dan “apa yang seharusnya” (*ought*).²⁶

Islam berorientasi praksis senyatanya disebutkan dengan tegas dan jelas di dalam banyak ayat Al Qur’an. Al Qur’an memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas sebagaimana yang tertuang dalam surat An Nisa’ ayat 75, “*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa:*

²⁵ Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 8

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*...., hal. 8

"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

Dari ayat ini, Al Qur'an mengungkapkan bahwa bila ada orang atau sekelompok orang yang melakukan penindasan atau mengeksploitasi kaum lemah dengan seenak mereka sendiri. Maka, sebagai masyarakat atau kaum muslim untuk membebaskan penganiayaan mereka dengan menggunakan perlawanan. Tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan sosial atau membebaskan kaum tertindas tanpa menggunakan perlawanan.

Konsep jihad dalam Islam bukan untuk mengedepankan kepentingan pribadi atau mempertahankan status quo, namun demi kepentingan orang yang tertindas atau lemah. Hal ini bisa dilihat kembali pada masa sahabat nabi yaitu Abu bakar As Shidiq. Saat pidato pertama setelah terpilih menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan, " Sekarang saya telah ditetapkan menjadi wali bagi kamu sekalian, meskipun saya tidak lebih baik dari kalian. Jika saya benar maka dukunglah saya, namun jika saya salah maka silahkan koreksi saya. Kebenaran adalah amanah, dan kebohongan adalah khiyanah. Siapa di antara kalian yang lemah, di mata saya kalian adalah kuat karena saya akan memenuhi hak-hak kalian sehingga hidup sejahtera, dan siapa di antara kalian yang kuat, di mata saya adalah lemah karena saya akan mengambil (yang kalian klaim) hak-hak kalian. Dari perkataan Khalifah abu bakar tersebut mengandung makna bahwa kebenaran, perlindungan terhadap kelompok lemah dan penindasan oleh

kelompok yang kuat. Beliau juga terbuka terhadap kritik, seandainya beliau melakukan kesalahan. Keinginan untuk berbuat baik, melindungi yang lemah dengan kekuasaan dan menganut prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan hal yang mendasar dalam teologi pembebasan.²⁷

B. Penyusunan Database

1. Pengertian Database

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah 1) keterangan yg benar dan nyata; 2) keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²⁸ Definisi lain menyebutkan data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Webster New World Dictionary, pengertian data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang

²⁷ *Ibid*, hal. 9-10

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 239

lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.²⁹

Database adalah kumpulan data-data yang terpadu yang disusun dan disimpan dalam suatu cara sehingga memudahkan untuk dipanggil kembali.³⁰

Database yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data sosial dan data spasial. Kata sosial dalam KBBI diartikan *berkenaan dengan masyarakat*³¹. Sosial dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi dengan antarmanusia dalam konteks masyarakat atau komuniti, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat.³² Soerjono mengemukakan bahwa istilah sosial berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial.³³ Data sosial adalah keterangan yang nyata mengenai kondisi masyarakat. Semua keterangan atau kenyataan yang berada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan segi kemanusiaan; segi kependudukan, ekonomi, kesehatan, pengeluaran rumah tangga, pertanian, dan peternakan.

²⁹ "Pengertian Data dan Jenis Data," dalam <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>, diakses pada 20 Desember 2013

³⁰ "Data Base dan Manajemen Data Base," dalam <http://santiw.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2013

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hal. 1085

³² Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping-Metode Pemetaan Sosial*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hal. 32

³³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Grafindo, 1993), hal. 464

Sedangkan kata spasial diartikan *berkenaan dengan ruang atau tempat*.³⁴

Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan (*georeference*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.³⁵ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.³⁶

Rajabidfard dan Williamson seperti yang dikutip Nana Apriyana, mendefinisikan data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, obyek, dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi, dimana didalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi, dibawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah atmosfer.³⁷

Sebuah data akan sangat bermanfaat bila data tersebut mampu menjadi informasi, artinya data tersebut mampu memberikan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 1086

³⁵ Wikipedia, "*Data Spasial*", id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial, diakses pada 26 September 2013.

³⁶ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, dalam gis.deptan.go.id/uu/perpres-85-2007.pdf, diakses pada 19 Desember 2013

³⁷ Nana Apriyana, "*Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)*", dalam http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=208, diakses pada 18 September 2013

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.³⁸ Misalnya informasi untuk pengambilan kebijakan atau keputusan, untuk merumuskan sebuah tujuan atau target, dan atau sebuah informasi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada intinya data yang terkelola tersebut dapat digunakan sebagai informasi publik³⁹.

Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun lokal.⁴⁰ Sistem informasi atau data yang berbasis keruangan pada saat ini merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan, sumber daya mineral, sosial dan ekonomi, dan lain-lain.

Sementara yang dimaksud dengan penyusunan database adalah proses menyusun atau mengumpulkan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis) yang dapat dipercaya untuk perorangan atau umum. Dalam menyusun kemudian mengelola data base maka diperlukan sebuah aksi untuk

³⁸ Undang-Undang No 14 Tahun 2008

³⁹ Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

⁴⁰ Wikipedia, "*Data Spasial*", dalam id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial, diakses pada 26 September 2013

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Cara tersebut dilakukan dengan pendataan. Pendataan memiliki arti sebagai 1) proses, cara, perbuatan mendata, 2) pengumpulan data; pencarian data.⁴¹ Dengan melakukan pendataan secara partisipatif maka akan didapat sebuah data desa yang valid sehingga menjadi data base. Dalam pengelolaan data terdiri dari dua data yaitu data sosial dan data spasial. Cara untuk mendapatkan data sosial dan spasial dapat dilakukan dengan pemetaan sosial dan spasial.

2. Pentingnya Data Sosial dan Spasial untuk Pembangunan

Di samping data sosial, data spasial menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan bukan hanya oleh pemerintah wilayah perkotaan saja. Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah tidak hanya ada di wilayah perkotaan namun juga di wilayah perdesaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung program pembangunan khususnya wilayah perdesaan, maka diperlukan sebuah data spasial maupun data sosial (nonspasial).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan haruslah direncanakan berdasarkan data (spasial dan nonspasial) dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi,

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hal. 239

termasuk data dan informasi spasial, serta pemerintah daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.⁴²

Bagi pemerintah atau kalangan bisnis, data ini bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan data tersebut, instansi pemerintah bisa membuat program yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jadi, tak bisa lagi memanipulasi anggaran. Perencanaan pembangunan tak bisa lagi tidak spasial. Efisiensi tercapai karena tak ada lagi tumpang-tindih pekerjaan. Selain itu, datanya multiguna, mudah diakses, dan bisa meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan data spasial nasional ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penganggaran dan *economic returns*, karena di Indonesia, faktor *economic returns* ini belum banyak diperhitungkan. Dengan menggunakan data, *economic returns* meningkat, efisiensi meningkat dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi dan mendorong sektor swasta. Sistem data sosial dan spasial akan sangat bermanfaat baik bagi pemerintah maupun dunia usaha karena data dan informasi spasial merupakan komoditas yang strategis. Kebutuhan dan manfaat akan data dan informasi spasial dirasakan oleh seluruh kalangan, baik institusi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum. Bagi pemerintah, integrasi data spasial akan membantu dalam melakukan analisis, seperti penanganan bencana, epidemi, maupun peta kemiskinan.

⁴² "Data Spasial", dalam <http://www.scribd.com/doc/49369830/DATA-SPASIAL>, diakses pada 23 Desember 2013

Informasi dan data spasial mempunyai kontribusi untuk pengambilan keputusan, termasuk keputusan di sektor investasi. Di Indonesia, aplikasi geospasial telah terbukti dapat mengoptimalkan strategi pemasaran. Perusahaan jasa telepon seluler dapat memanfaatkan data ini untuk menentukan lokasi menara BTS, usaha perbankan memanfaatkannya untuk menetapkan lokasi ATM, termasuk juga perusahaan minuman menggunakannya untuk optimasi rute dan distribusi produk. Investor bisa menghemat biaya untuk survei ke lokasi. Jadi berfungsinya sistem ini akan mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Saat ini telah ada sistem pengelolaan data spasial. Sistem tersebut bernama Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang dikelola Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sehingga data dari JDSN bisa dimanfaatkan untuk oleh berbagai pihak terkait, baik institusi pemerintah maupun swasta. JDSN adalah sistem pengelolaan data spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna. JDSN, yang terdiri atas simpul jaringan dan penghubung, yang berfungsi sebagai sarana pertukaran dan penyebarluasan data spasial.

Dalam perjalanannya, saat ini sudah tergabung 14 instansi pemerintah yang terkait dengan pengadaan data spasial. 14 instansi tersebut tengah berupaya menerapkan Perpres No. 85 Tahun 2007 yang, antara lain, mengamanatkan pembentukan unit kliring simpul jaringan, kebijakan penganggaran, serta kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Bakosurtanal juga sudah

menandatangani MoU dengan beberapa perguruan tinggi yang berfungsi sebagai Pusat Infrastruktur Data Spasial. Pada tahun 2009 diharapkan Perpres tersebut sudah diimplementasikan di tingkat pusat, walau ada kemungkinan beberapa daerah secara paralel akan menerapkannya. Data spasial yang akan diinformasikan dalam portal JDSN di antaranya berupa jalan, kebun, hutan, dan rumah.⁴³

Namun, sistem jaringan ini belum menyentuh Wilayah Kabupaten Klaten, khususnya Desa Sudimoro yang berada di Kecamatan Tulung ini sehingga kebutuhan data dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai perencanaan pembangunan desa belum maksimal dilakukan oleh pemerintah kecamatan setempat. Terbukti adanya bantuan langsung tunai atau sebutan yang biasa terkenal di masyarakat BLT, belum mampu menyentuh masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Dengan kata lain, BLT belum mampu didistribusikan secara tepat sasaran karena salah satunya peta kemiskinan di Desa Sudimoro belum tersedia. Antara pemerintah desa dan kecamatan, serta kabupaten tidak ada kesamaan data mengenai penduduk miskin dan penyebarannya.

⁴³ Nana Apriyana, “Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)”, dalam *bulletin.penataanruang.net*, diakses pada 19 Desember 2013

C. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Menurut KBBI, partisipasi artinya perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar, dsb).⁴⁴ Mengenai definisi partisipasi, belum ada definisi yang baku perihal apa yang dimaksud dengan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.⁴⁵ Definisi kedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.⁴⁶

Partisipasi dalam definisi konseptual dari Keith Davis, seperti dikutip Abu Huraerah, adalah *“participation is defined as mental and emotional*

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hal. 831

⁴⁵ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 222

⁴⁶ *Ibid*, hal. 222

involvement of persons in group goals and share responsibility for them” (Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya). Tiga gagasan pokok dalam pengertian di atas adalah *mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab).⁴⁷

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa kewenangan, yang menurut Heller, dikutip Sumarmi, menggambarkan di mana partisipasi adalah sebuah proses di mana individu mengambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang memengaruhinya. Sumarmi mengutip dari Maskun, partisipasi masyarakat ditentukan oleh 4 (empat) hal; (1) kebutuhan masyarakat, (2) interest masyarakat, (3) budaya dan adat istiadat, (4) sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat.⁴⁸

Sementara itu, menurut Sulaiman (seorang ahli pekerjaan sosial), seperti dikutip Abu Huraerah, mengungkapkan partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok atau dalam kesatuan

⁴⁷ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, cet. ke-2 (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 109-110

⁴⁸ Sumarmi, *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012), hal. 159

masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.⁴⁹

Menurut Muhadjir, seperti dikutip Sumarmi, bahwa konsep partisipasi itu sendiri memiliki banyak matra (multidimensional). Partisipasi dapat dilihat secara luas, sempit, dan lawan dari kegiatan-kegiatan politik dan dapat dilihat dari tipologinya. Partisipasi dilihat secara luas, dapat diartikan sama dengan demokrasi politik, di mana rakyat menentukan tujuan pembangunan, strategi untuk mencapai itu dan bentuk perwakilan politik yang dikehendaki agar objektivitas pembangunan tercapai. Partisipasi dilihat secara sempit dapat diartikan sebagai keterlibatan rakyat dalam keseluruhan proses perubahan dan perkembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan itu sendiri. Partisipasi dilihat sebagai lawan dari kegiatan-kegiatan politik, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan rakyat dalam usahanya agar kepentingannya diperhatikan oleh pengelola pembangunan negaranya. Dalam hal ini, partisipasi dianggap sebagai suatu cara di mana golongan-golongan masyarakat yang berbeda kepentingan, dididik untuk dapat mengajukan secara rasional dan dapat dikelola (*manageable*) keinginan-keinginan mereka dan mau menerima secara sukarela pula tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh proses pembangunan itu sendiri.⁵⁰

⁴⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat....*, hal. 109-110

⁵⁰ Sumarmi, *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan....*, hal. 160

Konsep partisipasi juga dijelaskan dalam Islam. Di dalam Islam diajarkan bahwa perubahan masyarakat harus dimulai dari diri manusianya (kesadaran). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT. dalam al- Qur'an surat ar-Ra'd ayat 11:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memperbaiki hidup harus dari diri sendiri atau masyarakat sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum, sebelum kaum tersebut mau berusaha untuk merubah dirinya sendiri. M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia menjadi pelaku perubahan. Dalam posisinya sebagai pelaku perubahan, di samping manusia berperan sebagai totalitas atau manusia sebagai wujud pribadi-pribadi personal, dalam ayat tersebut manusia diposisikan juga sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat. Pemakaian kata *qaum* menunjukkan bahwa proses perubahan yang dimaksud adalah sebuah proses perubahan masyarakat (sosial).⁵²

⁵¹ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-10 (Bandung: Mizan, 2001), hal. 242

⁵² M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al Qur'an....*, hal. 242

Membangun partisipasi masyarakat dilakukan melalui proses pengorganisasian untuk memecahkan problem masyarakat. Proses pengorganisasian masyarakat menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) sebagai peranan proses dakwah. Metode ini bukan saja berorientasi pada aksi dan pemecahan masalah, melainkan yang lebih utama adalah mendayagunakan seluruh potensi lokal untuk turut serta secara aktif melaksanakan suatu perubahan-perubahan yang membawa perbaikan kualitas hidup manusia.⁵³

Dakwah sangat terkait dengan perubahan sosial. Upaya dakwah seharusnya diartikan sebagai suatu aktivitas yang membawa konsekuensi perubahan sosial yang terencana, bukannya perubahan sosial yang terjadi begitu saja. Seorang da'i atau fasilitator oleh karenanya haruslah tahu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial serta dampak-dampaknya.⁵⁴

Dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa perubahan masyarakat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok: (a) adanya nilai atau ide, dan (b) adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai tersebut.⁵⁵ Al-Qur'an melakukan perubahan sosial lewat ide. Al-Qur'an memang menaruh perhatian yang besar pada perubahan atau pembaruan ide. Bahkan, Allah memperingatkan jangan

⁵³ Salahuddin Hardy, "Dakwah Bil-Hal dan Sistem Ekonomi Islam," dalam Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini dan A. Halim (eds.), *Dakwah Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 31

⁵⁴ *Ibid*, hal. 26

⁵⁵ Misbahul Ulum, "Konsep Tagyir dan Pengembangan Potensi Masyarakat" dalam Suisyanto, Muh. Abu Suhud dan Wayono, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam: Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta: PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 7

sampai orang-orang kafir menyebabkan berubahnya pandangan atau ide di kalangan umat Islam.⁵⁶ *Pertama*, manusia adalah pelaku yang menciptakan sejarah, tujuannya gambaran masa depan yang telah ada dalam benak manusia.⁵⁷ Syarat *kedua* perubahan masyarakat adalah adanya nilai-nilai atau ide. Nilai terpenting yang mendasari serta mengarahkan seluruh aktivitas manusia lahir dan batin, dan kepadanya pula bermuara semua gerak tingkah laku manusia, adalah tauhid (ke-Esa-an Allah).⁵⁸

Dalam ajaran Islam, tujuan pengembangan masyarakat tidak hanya untuk suatu kemajuan atau kesejahteraan saja, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang normatif, ini berarti bahwa kemajuan material untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak terpisahkan dengan kesadaran serta perilaku berbuat baik agar kemajuan dan kesejahteraan itu dapat memberi barokah bagi semua dan membawa pada keselamatan.

Dengan demikian, Pengembangan Masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku perorangan. Dalam pengertian lain yang disederhanakan, pengembangan masyarakat atau sumber daya manusia diartikan sebagai, memperluas horison pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini dapat dikatakan, bahwa

⁵⁶ Salahuddin Hardy, "*Dakwah Bil-Hal....*", hal. 27

⁵⁷ Misbahul Ulum, "*Konsep Tagyir dan Pengembangan....*", hal. 7

⁵⁸ *Ibid*, hal. 7

masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih.⁵⁹ Memilih yang terbaik untuk dirinya sesuai kebutuhannya dan potensi yang dimiliki. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.⁶⁰

Dengan mengutamakan sumberdaya utama berupa sumberdaya informasi dan prakarsa kreatif yang berkelanjutan, serta tujuan utamanya adalah perkembangan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia, maka dapat memberi peran kepada individu sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.⁶¹

2. Tipologi Partisipasi

Menurut Muhadjir seperti yang dikutip Sumarmi, menyatakan dilihat tipologinya, partisipasi dapat dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif partisipasi seseorang dilihat dari frekuensi keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini semakin banyak dia hadir dalam suatu

⁵⁹ Nani Machendarwaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 29

⁶⁰ Windiani, "Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan Borongan di Rumah," dalam *Jurnal Sosiologi Islam* No. 01/I, Oktober 2011, (Surabaya: Program Studi Sosiologi IAIN Sunan Ampel, 2011), hal. 28

⁶¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat....*, hal. 29

kegiatan, dapat disebut partisipasinya tinggi. Secara kualitatif, partisipasi dibedakan antara tingkat dan derajatnya.⁶²

Partisipasi dilihat dari tingkatannya ada tiga, yaitu: (1) *idea planning stage* (tingkat perencanaan), (2) *implementation stage* (tingkat pelaksanaan), dan (3) *utilization stage* (tingkat pemanfaatan hasil). Partisipasi pada tingkat pertama merupakan tingkat yang paling tinggi, yaitu sejauh mana masyarakat ikut ambil bagian dalam musyawarah untuk menyusun perencanaan pembangunan. Pada tingkat ini seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pada tingkat kedua adalah sejauh mana masyarakat ikut serta atau ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi pada tingkat ke tiga (paling rendah) adalah sejauh mana masyarakat bersedia dan mau ikut memanfaatkan pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat diungkapkan dengan penilaian masyarakat terhadap bangunan atau prasarana yang telah dibangun.⁶³

Partisipasi dilihat dari derajatnya, dibedakan menjadi lima derajat, yaitu: (1) berpartisipasi tanpa mengenal ide objek partisipasi yang bersangkutan. Hal ini berarti berpartisipasi memang karena diperintahkan untuk ikut; (2) berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru tersebut dan ada daya tarik dari objek dan ada minat dari subjek; (3) berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide tersebut memang baik; (4) berpartisipasi karena yang

⁶² Sumarmi, *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan....*, hal. 161

⁶³ *Ibid*, hal. 161

bersangkutan telah melihat lebih mendetail tentang alternatif pelaksanaan atau penerapan ide tersebut; dan (5) berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung dapat memanfaatkan ide dan usaha pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarganya atau masyarakat.⁶⁴

3. Upaya Mendorong dan Mendukung Partisipasi

Upaya untuk mendorong dan mendukung seseorang untuk berpartisipasi dalam kenyataannya memang terkadang sulit. Namun di luar kesulitan tersebut partisipasi masyarakat dapat diwujudkan. Dalam proses pengembangan masyarakat mendorong partisipasi merupakan bagian kritis. Proses pengembangan atau pengorganisasian masyarakat tersebut merupakan suatu kerangka proses yang menyeluruh untuk memecahkan permasalahan tertentu di tengah rakyat, sehingga bisa diartikan sebagai suatu cara pendekatan bersengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka memecahkan berbagai masalah masyarakat tersebut.⁶⁵ Karena dengan mendorong partisipasi berkaitan erat dengan mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi adalah sebagai berikut:⁶⁶

Pertama, *orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting*. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika rakyat

⁶⁴ *Ibid*, hal. 162

⁶⁵ Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: SEAPCP, 2003), hal. 5

⁶⁶ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*, diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, dan M. Nur Sahid dengan judul *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 310-312

sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya, bukan berasal dari orang luar yang memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Salah satu kunci keberhasilan mengorganisasi masyarakat adalah pemilihan isu untuk diurus, dan hal yang sama juga berlaku dalam domain yang lebih luas dari pengembangan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya bagi seorang pekerja masyarakat untuk membuat definisi akan kebutuhan dari prioritas muncul dari masyarakat sendiri, bukan terperangkap dalam mencarinya sendiri serta memaksakannya kepada masyarakat.

Kedua, orang *harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan*. Masyarakat mungkin telah menentukan pekerjaan sebagai prioritas utama, tetapi jika orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk berpartisipasi. Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat perbedaan dan bahwa hal tersebut akan menghasilkan perubahan yang berarti.

Ketiga, *berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai*. Orang juga harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perbedaan pada tingkat individu. Seseorang mungkin percaya bahwa suatu isu penting, dan bahwa aksi masyarakat dapat menghasilkan sesuatu, tetapi mungkin ia percaya bahwa anggota masyarakat yang lain akan mampu mengerjakannya, dan ia tidak mempunyai sesuatu untuk dikontribusikan. Terlalu sering partisipasi masyarakat dipandang sebagai keterlibatan dalam kepengurusan, pertemuan resmi, dan prosedur-

prosedur tradisional lainnya (yaitu kulit putih, laki-laki, kelas menengah). Meskipun proses semacam itu bisa saja penting, banyak macam partisipasi masyarakat lain yang sama berharganya. Partisipasi masyarakat haruslah sesuatu buat semua orang, dan variasi keterampilan, bakat dan minat orang harus diperhitungkan.

Keempat, *orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya*. Hal ini berarti bahwa isu-isu seperti transportasi, penyediaan penitipan anak (atau melibatkan anak dalam kegiatan), keamanan, waktu dan lokasi kegiatan serta lingkungan tempat kegiatan akan dilaksanakan sangatlah penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses-proses berbasis masyarakat.

Kelima, *struktur dan proses tidak boleh mengucilkan*. Prosedur-prosedur pertemuan tradisional, dan teknik pembuatan keputusan sering bersifat mengucilkan bagi banyak orang khususnya, bagi mereka yang tidak bisa “berpikir cepat”, tidak ingin menginterupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran berbicara.

Adapun usaha untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Meningkatkan pengetahuan atau pendidikan anggota masyarakat, sehingga mereka mampu berpartisipasi;
- 2) Usaha memobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang serasi untuk kepentingan pencapaian tujuan pembangunan, dan

- 3) Meningkatkan kegiatan swadaya dan swakarya masyarakat itu sendiri dalam proses pembangunan. Sedang cara-cara menggerakkan partisipasi masyarakat antara lain: (1) program pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat setempat, (2) melalui wadah atau lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan (3) peningkatan peranan masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan data di Desa Sudimoro harus senantiasa berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan melalui pendekatan serta komunikasi yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, Goldsmith dan Blustain di Jamaika dalam Ndraha yang dikutip Sumarmi, berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- 1) Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan
- 3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

⁶⁷ Sumarmi, *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan....*, hal. 162

4) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.⁶⁸

Selanjutnya partisipasi masyarakat juga ditentukan oleh (1) Adanya pemahaman timbal balik antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi dengan masyarakat yang bersangkutan, (2) terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas *good will* pemerintah dan *political will* pemerintah, (3) tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan pemerintah, dan (4) terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimuli yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.⁶⁹

4. Kritik Pembangunan Tanpa Partisipasi Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan juga selalu berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakatnya. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat tidak pernah dijumpai pemuasan kebutuhan yang absolut, oleh karena itu selalu muncul tuntutan kebutuhan yang baru. Realitas bahwa masyarakat selalu berusaha

⁶⁸ *Ibid*, hal. 164

⁶⁹ *Ibid*, hal. 159

untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sosial, menyebabkan dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi proses dan perubahan. Bahkan tanpa dikaitkan dengan dua persoalan tersebut masyarakat senantiasa mengalami perubahan, karena tidak pernah ditemui masyarakat yang benar-benar statis. Perubahan sosial dapat berdampak pada progres dan regres. Perubahan berdampak pada progres diharapkan menuju pada kondisi yang semakin sejahtera. Perubahan ke arah progres tersebut biasa disebut sebagai perkembangan atau pembangunan.⁷⁰

Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan masyarakat akan berhasil apabila terdapat keterlibatan dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan bisa menentukan arah tindakan yang tepat. Masyarakat perlu dimotifasi agar semakin kuat, yang dapat melakukan tindakan yang nyata dalam penanganan masalah database di daerahnya. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan data base desa akan lebih ditingkatkan. Dalam hubungan ini, akan ditingkatkan usaha untuk meningkatkan organisasi dan jalur sosial, termasuk jaringan-jaringan kemasyarakatan (agama, sosial dan budaya).

Pendekatan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah lebih menekankan pada pendekatan ekonomi (lebih memusatkan pertumbuhan

⁷⁰ Dirangkum dari Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 25-27

ekonomi). Hal ini terlihat pada program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah selama ini belum menampakkan sebagai suatu program pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Beberapa program pembangunan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah seperti PNPM Mandiri Pedesaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin, Batuan Beras Miskin (Raskin) dan sebagainya. Dalam prakteknya pelaksanaan program belum menyentuh permasalahan utama dan pemecahan masalah.

Jika program atau upaya untuk memberdayakan masyarakat masih merupakan upaya yang bersifat *charity* (amal) yaitu suatu program yang berupa membagi ikan tanpa ditunjukkan bagaimana memancing supaya mendapat ikan, maka program tersebut akan membuat masyarakat semakin tergantung pada program amal yang diberikan tersebut. Konsekuensinya akan mematikan kreatifitas masyarakat dan pada akhirnya program pemberdayaan (pembangunan, red) tersebut sulit untuk berhasil. Walaupun terlihat berhasil, dalam lingkup *grass root* terjadi konflik sosial yang menimbulkan kecemburuan sosial. Sementara Paulo Freire mengatakan, karena lelah dan mati rasa, kekurangan dan embutuhkan segala sesuatu, mereka menjadi mangsa yang mudah untuk

kebijakan-kebijakan bantuan dan pertolongan yang membenamkan mereka lebih lanjut dalam keberadaan dari hari ke hari yang memicikkan.⁷¹

Untuk mengatasi ketidakberdayaan dan kemiskinan menurut Korten dan Syahrir diperlukan kebijakan yang sangat mendasar serta mengutamakan dimensi kerakyatan (*community based development*), sebab hanya orang miskin yang tahu kebutuhannya (*development from within*).⁷² Oleh karena itu perlu adanya pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat miskin tersebut, baik terkait pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi, potensi untuk mengelola dan pemenuhannya sendiri (*self management*), maupun potensi lokal yang dimiliki.

Pemerintah Indonesia tampaknya telah meyakini bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Kemauan pemerintah untuk memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan langkah maju. Namun walaupun ada kemauan pemerintah, pelaksanaan konsep ini di lapangan masih cukup banyak mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain;⁷³

Hambatan *pertama* yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna

⁷¹ Paulo Freire, *Pedagogi Hati*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 42

⁷² Windiani, "Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan Borongan di Rumah," dalam *Jurnal Sosiologi Islam* No. 01/I, Oktober 2011..., hal. 26

⁷³ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif....*, hal. 256

sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Hambatan *kedua* yang ditemukan di lapangan adalah reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diperlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru di negara kita. Sebagai suatu ideologi maka pembangunan harus diamankan dan dijaga dengan ketat. Persepsi seperti ini mendukung asumsi bahwa subsistem adalah suatu subordinate dari suprasistem dan membuat subsistem menjadi bagian yang benar-benar pasif. Hambatan *ketiga* dalam partisipasi adalah paternalisme⁷⁴.

Konsep pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top-down*, elitis, sedangkan pemberdayaan lebih bersifat *bottom-up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat.⁷⁵ Menurut Mansour Fakih, kedekatan konsep pembangunan dengan kebijakan yang bersifat *top-down* karena negara memainkan peranan yang sangat dominan dalam pembangunan bangsa. Hampir tidak ada ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya secara leluasa dalam proses pembangunan bangsanya. Negara-negara yang demikian ini menganut model

⁷⁴ Sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak.

⁷⁵ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, (Bandung: Humaniora, 2006), hal. 1

“pembangunan pertumbuhan cepat” (*rapid growth development model*), yaitu suatu model pertumbuhan yang tanpa didukung oleh tabungan dan investasi domestik.⁷⁶ Walaupun negara akhirnya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi model pembangunan yang tidak didukung oleh kemampuan tabungan dan investasi domestik ini sangat rapuh terhadap gejolak perubahan di tingkat global.⁷⁷

Ufford dan Giri menyebutkan bahwa kegagalan dan kekecewaan dalam pembangunan terjadi karena pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan menyesatkan, kalau saja lembaga-lembaga donor memiliki teori yang lebih baik, hasil-hasil pembangunan akan menjadi lebih positif.⁷⁸

Kunci keberhasilan program pembangunan untuk membebaskan masyarakat dari permasalahan yang dihadapi bertumpu pada kemampuan sumber daya lokal, berorientasi membangun kemandirian internal masyarakat, adanya dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, dan keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendorong dinamika pembangunan kawasan atas dasar tanggung jawab bersama, kepedulian sosial, dan bersifat menguntungkan bagi semua pihak secara berkelanjutan.

⁷⁶ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hal. 88

⁷⁷ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir....*, hal. 2

⁷⁸ Philip Quartes van Ufford dan Ananta Kumar Giri, *A Moral Critique Of Development*, diterjemahkan PeMad dengan judul *Kritik Moral Pembangunan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 73